

**LAPORAN KEGIATAN KOMISI I DPR RI  
DALAM MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2021-2022  
TANGGAL 15 MARET - 16 MEI 2022  
(Masa Sidang Mulai Tanggal 15 Maret – 14 April 2022  
dan Masa Reses Mulai Tanggal 15 April – 16 Mei 2022)**

---

Berdasarkan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah *juncto* Pasal 59 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib menjelaskan tentang tugas Komisi dalam bidang pembentukan undang-undang (legislasi), anggaran, dan pengawasan.

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Komisi I DPR RI pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022 adalah sebagai berikut:

**I. Kinerja Fungsi Legislasi**

**1. Penyusunan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (RUU Penyiaran)**

Komisi I DPR RI masih melanjutkan penyusunan terhadap RUU Penyiaran.

**2. RUU tentang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP)**

- a. Pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022 Panja RUU PDP Komisi I DPR RI belum melanjutkan pembahasan RUU tentang PDP dengan Pemerintah karena masih menunggu kesiapan Pemerintah untuk membahas pasal-pasal krusial dalam RUU PDP, diantaranya mengenai kelembagaan.
- b. Rapat Paripurna DPR RI tanggal 12 April 2022 telah menyetujui waktu perpanjangan pembahasan RUU PDP sampai dengan Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022.

**3. RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji tentang Kerja Sama Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Fiji concerning Cooperation in the Field of Defence*)**

Pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022, Komisi I DPR RI telah mengadakan RDPU dengan para Pakar/Akademisi yaitu : Prof. Huala Adolf, SH., LL.M., Ph.D; Kusnanto Anggoro, Ph.D; dan Curie Maharani Savitri, Ph.D. dalam rangka mendapatkan masukan terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji tentang Kerja Sama Bidang Pertahanan pada tanggal 22 Maret 2022.

**II. Kinerja Fungsi Anggaran**

Terkait dengan fungsi anggaran, pada MP IV TS 2021-2022, Komisi I DPR RI telah melaksanakan Raker/RDP dengan Mitra Kerja Komisi I DPR RI dalam rangka pembahasan realisasi dan evaluasi pelaksanaan APBN Mitra Kerja Komisi I DPR RI TA 2021, yaitu:

1. RDP Komisi I DPR RI dengan Kepala Bakamla pada tanggal 16 Maret 2022
2. Raker Komisi I DPR RI dengan Kepala BSSN pada tanggal 17 Maret 2022

3. RDP Komisi I DPR RI dengan LPP RRI dan LPP TVRI pada tanggal 21 Maret 2022
4. Raker Komisi I DPR RI dengan Menteri Komunikasi dan Informatika R.I dan menghadirkan KPI, KIP, dan Dewan Pers pada tanggal 22 Maret 2022
5. Raker Komisi I DPR RI dengan Menteri Luar Negeri RI pada tanggal 6 April 2022
6. Raker Komisi I DPR RI dengan Kepala BIN pada tanggal 12 April 2022

### III. Kinerja Fungsi Pengawasan

Terkait dengan fungsi pengawasan, pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022 Komisi I DPR RI telah melaksanakan:

#### 1. Raker/RDP dengan Mitra Kerja Komisi I DPR RI

- a. **RDP Komisi I DPR RI dengan Kepala Bakamla**, tanggal 16 Maret 2022 dalam rangka membahas program prioritas Bakamla terkait Keamanan Laut Tahun 2022, dan isu-isu aktual strategis lainnya.



- b. **Raker Komisi I DPR RI dengan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)**, tanggal 17 Maret 2022 dalam rangka mendapatkan penjelasan Kepala BSSN terkait dengan:

- 1) Peran BSSN terhadap isu transformasi digital dan keamanan siber dalam upaya mendukung pelaksanaan rangkaian kegiatan P20 bulan September 2022 dan KTT G20 bulan November 2022 di Bali; dan
- 2) Peran BSSN dalam menghadapi tren keamanan siber saat ini dan tantangan masa depan.

- c. **RDP Komisi I DPR RI dengan Dewas dan Dirut LPP RRI dan LPP TVRI**, tanggal 21 Maret 2022 dalam rangka :

- 1) Penjelasan LPP TVRI mengenai:
  - a) Kesiapan LPP TVRI sebagai *host broadcaster* dalam hajatan G 20;
  - b) LPP TVRI sebagai stasiun siaran luar negeri baru sebagai kekuatan *soft diplomacy*.
2. Penjelasan LPP RRI mengenai:
  - a) Penguatan jaringan siaran RRI berbasis *multiplatform* di wilayah 3T dan daerah *blankspot* sebagai media layanan informasi dan edukasi penguatan NKRI;
  - b) Peran LPP RRI dalam penyuksesan penyelenggaraan G20.

Dalam RDP tersebut disepakati kesimpulan bahwa:

- 1) dalam rangka mensukseskan Presidensi G20 tahun 2022, Komisi I DPR RI mengharapkan LPP TVRI yang telah ditunjuk menjadi Host Broadcaster Presidensi G20 2022 sesuai surat penunjukan dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) RI dan LPP RRI dapat memaksimalkan perannya masing masing serta membangun sinergi dan kolaborasi sehingga mewujudkan sebaran informasi publik yang kredibel, jernih, lancar serta memiliki daya jangkau ke segenap lapisan masyarakat Indonesia dan dunia internasional tentang pelaksanaan KTT G20. Selanjutnya, Komisi I DPR RI juga telah mendengarkan penjelasan dari LPP TVRI terkait pengajuan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) Sehubungan dengan pelaksanaan G 20 Summit untuk perluasan jaringan satelit dan Pay TV ke seluruh

dunia sebesar Rp 80.000.000.000,- (Delapan puluh milyar) untuk kontrak selama setahun.

- 2) Komisi I DPR RI mendukung TVRI World sebagai stasiun siaran luar negeri baru dan kekuatan soft diplomacy dalam upaya promosi, pariwisata, seni, budaya, berita tentang Indonesia, dan isu-isu aktual untuk pemirsa dalam dan luar negeri.
- 3) Komisi I DPR RI mendukung LPP RRI dalam upaya peningkatan pelayanan dan penyampaian informasi kepada masyarakat melalui penguatan jaringan siaran RRI berbasis multiplatform di wilayah 3T dan daerah blankspot sebagai media layanan informasi dan edukasi penguatan NKRI serta memperluas jangkauan siaran (coverage area), khususnya daerah blankspot yang sebelumnya sama sekali tidak bisa menerima sinyal radio serta terpenuhinya jangkauan siaran RRI di wilayah 3T.

**d. Raker Komisi I DPR RI dengan Menkominfo, tanggal 22 Maret 2022 dalam rangka mendapatkan penjelasan mengenai:**

- 1) Kesiapan Kemkominfo dalam menyukseskan presidensi melalui 3 isu DEWG (*Digital Economy Working Group*) utamanya di Arus Data Lintas Batas Negara (*Cross border data flow and data free flow with trust*);
- 2) Peta Jalan Indonesia Digital 2021-2024;
- 3) Progress pembentukan Pansel Calon KPI Pusat Periode 2022-2025;
- 4) Isu-isu aktual lainnya.

Dalam Raker tersebut disepakati kesimpulan bahwa:

- 1) berkaitan dengan Arus Data Lintas Batas Negara (*Cross Data Border Data Flow and Data Free Flow with Trust*) yang merupakan salah satu isu DEWG (*Digital Economy Working Group*) dalam pertemuan G-20, Komisi I DPR RI dan Kemkominfo secara bersama-sama serius menindaklanjuti pembahasan RUU PDP dan menuntaskannya, sehingga menjadi payung hukum komprehensif guna memberikan jaminan terhadap perlindungan dan keamanan data serta menjaga kedaulatan negara.
- 2) Komisi I DPR RI mendukung langkah Kemkominfo untuk melakukan transformasi digital dengan merujuk pada peta jalan Indonesia Digital 2021-2024. Sehubungan hal tersebut, Komisi I DPR RI meminta Kemkominfo untuk menyiapkan regulasi pendukung serta indikator/parameter keberhasilan pelaksanaan peta jalan digital 2021-2024.
- 3) Komisi I DPR RI meminta Kemkominfo untuk mengawal keberadaan LPP TVRI agar tetap menjadi *Host Broadcaster* Presidensi G20 tahun 2022 merujuk surat penunjukan dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) RI dengan mempertimbangkan keberadaan LPP TVRI sebagai LPP yang kredibel, teruji dan jangkauan siaran yang luas.

**e. Raker Komisi I DPR RI dengan Menhan, Menkeu, dan Panglima TNI beserta KASAL, pada tanggal 24 Maret 2022 dalam rangka pembahasan persetujuan penjualan Barang Milik Negara berupa Kapal Eks KRI Teluk Sampit-515 pada Kementerian Pertahanan R.I.**

Dalam Raker tersebut disepakati kesimpulan bahwa setelah mendengarkan penjelasan Wakil Menteri Pertahanan, Wakil Menteri Keuangan, Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Laut, dan pendapat Fraksi-fraksi, Komisi I DPR RI memutuskan menyetujui usulan penjualan Barang Milik Negara berupa Kapal Eks KRI Teluk Sampit-515 pada Kementerian Pertahanan sesuai dengan Surat Presiden RI Nomor R-57/Pres/12/2021 perihal "Permohonan Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara Berupa Kapal Eks KRI Teluk Sampit-515 pada Kementerian Pertahanan" dan dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. **Raker Komisi I DPR RI dengan Menteri Luar Negeri RI**, pada tanggal 6 April 2022 dalam rangka mendapatkan penjelasan mengenai:

- 1) Pelindungan WNI dan BHI di Ukraina;
- 2) Diplomasi Indonesia terkait konflik Rusia dan Ukraina;
- 3) *Special Procedures Mandate Holders* (SPMH) mengenai sejumlah kasus dugaan penghilangan paksa, penggunaan kekerasan berlebihan, penyiksaan, dan pemindahan paksa di Provinsi Papua dan Papua Barat.

g. **Audiensi Tim Advokasi Hak Masyarakat Adat Intan Jaya Papua dengan Komisi I DPR RI**, pada tanggal 11 April 2022 terkait dengan situasi keamanan di Intan Jaya dan Papua.

h. **Raker Komisi I DPR RI dengan Kepala BIN**, pada tanggal 12 April 2022, dalam rangka mendapatkan penjelasan mengenai:

- 1) Hasil Monitoring pemetaan, dan pendalaman atas deteksi dini dan cegah dini terhadap rangkaian kegiatan P20 bulan September 2022, dan KTT G20 bulan November 2022 di Bali;
- 2) Hasil Monitoring, pemetaan, dan pendalaman atas deteksi dini dan cegah dini terhadap isu-isu strategis nasional dan internasional dalam perspektif intelijen negara.

## 2. Panja Pengawasan Komisi I DPR RI

### Panja Penyediaan Akses Internet Komisi I DPR RI

Panja telah melaksanakan Kunjungan Kerja ke Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara pada tanggal 7-9 April 2022.



## 3. Uji Kepatutan dan Kelayakan Calon Anggota Komisi Informasi (KI) Pusat Periode 2021-2025

a. Dalam rangka menindaklanjuti penugasan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus DPR RI tanggal 7 Februari 2022 yang menugaskan Komisi I DPR RI untuk membahas Calon Anggota Komisi Informasi Pusat Periode 2021-2025 berdasarkan Surat Presiden Nomor: R-59/Pres/12/2021 tanggal 17 Desember 2021 perihal Calon Anggota Komisi Informasi Pusat Periode 2021-2025, Komisi I DPR RI pada tanggal 28-29 Maret 2022 telah melaksanakan Uji Kepatutan dan Kelayakan terhadap 21 (duapuluh satu) Calon Anggota KI Pusat Periode

2021-2025, dengan hasil sebagai berikut:

- 1) Komisi I DPR RI telah menyepakati dan menetapkan 7 (tujuh) Calon Anggota Komisi Informasi Pusat Periode 2021-2025 yang mencakup 2 unsur (Pemerintah dan Masyarakat) berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan urutan nama berdasarkan abjad, yaitu :

NO	NAMA	KETERWAKILAN UNSUR
1.	Arya Sandhiyudha	Masyarakat
2.	Donny Yoesgiantoro	Masyarakat
3.	Gede Narayana	Pemerintah
4.	Handoko Agung Saputro	Masyarakat
5.	Rospita Vici Paulyn	Masyarakat
6.	Samrotunnajah Ismail	Pemerintah
7.	Syawaludin	Masyarakat

- 2) Komisi I DPR RI juga telah menetapkan 3 (tiga) orang Calon Anggota Komisi Informasi Pusat Periode 2021-2025 sebagai calon penggantian antarwaktu Anggota Komisi Informasi Pusat berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan urutan sebagai berikut:

NO	NAMA	KETERWAKILAN UNSUR
1.	Nani Nurani Muksin	Masyarakat
2.	Endra Mayendra	Masyarakat
3.	Netty Herawaty	Pemerintah

- b. Komisi I DPR RI juga telah menyampaikan Laporan Hasil Uji Kepatutan dan Kelayakan Komisi I DPR RI terhadap 21 (duapuluh satu) Calon Anggota KI Pusat Periode 2021-2025 dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 12 April 2022.

#### 4. Kunker Komisi I DPR RI

##### a. Kunker Spesifik Komisi I DPR RI pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022 ke:

- 1) Jawa Tengah (Semarang) pada tanggal 18 – 20 Maret 2022 dalam rangka mengetahui kesiapan Kodam IV/Diponegoro dalam mengamankan wilayah dari berbagai kerawanan dan perbantuan dalam penanganan pandemi Covid-19 dengan dukungan Alutsista dan sarana prasarana yang ada;



- 2) Jawa Timur (Surabaya) pada tanggal 18 – 20 Maret 2022 dalam rangka mengetahui kesiapan Kodam V/Brawijaya dalam mengamankan wilayah dari berbagai kerawanan dan perbantuan dalam penanganan pandemi Covid-19 dengan dukungan Alutsista dan sarana prasarana yang ada;





- 3) Bali pada tanggal 18 – 20 Maret 2022 dalam rangka mengetahui peran Lanal Denpasar dalam mendukung pengamanan wilayah terkait event internasional Tahun 2022 di Bali dan sekitarnya;



- 4) Sulawesi Selatan pada tanggal 30 Maret – 1 April 2022 dalam rangka mendapatkan penjelasan Kabinda Sulsel mengenai:
- a) Hasil monitoring, pemetaan, dan pendalaman atas deteksi dini dan cegah dini terhadap imigran gelap dan pencari suaka
  - b) Hasil monitoring, pemetaan, dan pendalaman atas deteksi dini dan cegah dini terhadap isu-isu strategis lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan dalam perspektif intelijen



- 5) Banten (Tangerang) pada tanggal 1 – 3 April 2022 dalam rangka mengetahui kesiapan Brigkav 1/Limpung Alugoro dalam mendukung pengamanan wilayah sesuai tugas pokok TNI dengan dukungan alat peralatan pertahanan serta sarana prasarana yang dimiliki



- 6) Jawa Barat (Bandung) pada tanggal 1 – 3 April 2022 dalam rangka mengetahui kesiapan Pussenarmed sebagai center excellent guna menyiapkan prajurit artileri medan dalam mendukung tugas pokok TNI dengan dukungan alat peralatan pertahanan serta sarana prasarana yang dimiliki



**b. Kunker Reses Komisi I DPR RI pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022**

Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja Mitra Kerja Komisi I DPR RI di daerah, pada Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022, Komisi I DPR RI melaksanakan Kunker Reses ke Provinsi:

- 1) Kepulauan Riau (Batam) pada tanggal 16 – 19 April 2022;



- 2) Riau (Pekanbaru) pada tanggal 16 - 19 April 2022;



- 3) Jambi pada tanggal 19 - 22 April 2022



**5. Menerima Kunjungan Delegasi/Tamu Asing/Dubes Negara Sahabat untuk Indonesia**

Pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022, Pimpinan Komisi I DPR RI beserta beberapa orang Anggota Komisi I DPR RI telah menerima:

- a. Courtesy call GKS Parlemen Rumania dan didampingi oleh Duta Besar Rumania pada tanggal 29 Maret 2022;
- b. Rountable Discussion Komisi I DPR RI dengan Menlu Kanada pada tanggal 10 April 2022;
- c. Courtesy call Dubes Ukraina untuk Indonesia pada tanggal 11 April 2022; dan
- d. Courtesy call Dubes Rusia untuk Indonesia pada tanggal 12 April 2022.

**6. Pertemuan Konsultasi antara Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Fraksi-Fraksi dan Pimpinan Komisi I DPR RI dengan Kementerian Luar Negeri RI**

Pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022, Pimpinan Komisi I DPR RI juga telah melaksanakan pertemuan Konsultasi dengan Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Fraksi-Fraksi, dan dengan Kementerian Luar Negeri RI dalam rangka membicarakan pencalonan Dubes Negara Sahabat untuk Republik Indonesia:

- a. Malaysia;
- b. Republik Persatuan Tanzania;
- c. Republik Austria;
- d. Republik Seychelles;
- e. Konfederasi Swiss;
- f. Kerajaan Belgia;
- g. Republik Finlandia;
- h. Republik Djibouti; dan
- i. Kerajaan Lesotho

**IV. PENUTUP**

Demikian Laporan Kegiatan Komisi I DPR RI pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022.

Jakarta, 25 April 2022  
**KABAGSET. KOMISI I DPR RI,**

**SARTOMO, S.S., M.Si.**  
**NIP. 196808111996031001**